

## **BAB II**

### **REVOLUSI MESIR DAN TRANSISI POLITIK PASCA MUBAROK**

Jatuhnya Husni Mubarak menandai lahirnya gerakan demokrasi baru di Mesir. Akan tetapi, jatuhnya Mubarak bukanlah sebatas jatuhnya seorang pemimpin karena krisis politik, melainkan karena ada skenario politik yang berlangsung begitu kuat, sehingga terjadi gelombang demonstrasi yang menuntut Mubarak mundur. Skenario politik ini terjadi karena adanya tuntutan politik yang begitu besar dari rakyat, sehingga rakyat menuntut lahirnya perubahan bagi masa depan Mesir.

Banyak pihak yang mampu berperan atas jatuhnya Mubarak, yang paling krusial perannya adalah kaum muda. Kaum muda Mesir bukan saja para aktivis pergerakan, melainkan juga kaum muda yang duduk sebagai kelas menengah yang mempunyai perhatian tinggi terhadap perubahan Mesir. Media sosial contohnya facebook, twitter, blog, dan sebagainya menjadi media efektif lahirnya perubahan. Desakan kaum muda dari berbagai elemen di Mesir inilah yang meruntuhkan kekuasaan Mubarak dan menjaga stabilitas politik Mesir di tengah transisi.

#### **A. Jatuhnya Rezim Mubarak**

Husni Mubarak, seorang pemimpin yang cukup keras dan telah memimpin Mesir selama tiga dekade, akhirnya harus mengakhiri kekuasaannya pada Februari 2011. Peristiwa yang berhasil menarik perhatian khusus dari berbagai kalangan

dalam skala internasional ini diawali dengan munculnya keberanian rakyat Mesir untuk menuntut Mubarak turun setelah melihat masyarakat Tunisia yang berhasil melengserkan sang presiden, Zine Al-Abidine Ben Ali. Hal inilah yang menjadi inspirasi bagi masyarakat Mesir untuk ikut melengserkan pemimpin mereka. Proses yang dilalui rakyat Mesir untuk menjatuhkan Mubarak pun tidak singkat. Butuh pengorbanan waktu, tenaga, atau pun nyawa untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi tuntutan mereka.<sup>20</sup>

Memang dalam kenyataannya, beberapa negara di kawasan Timur Tengah termasuk ke dalam kategori negara yang selama beberapa masa dipimpin oleh pemerintahan yang otoriter. Rezim di negara-negara tersebut dinilai kurang demokratis oleh negara-negara di wilayah barat. Dari segi internal ditemukan bahwa banyak rezim yang berdiri sekian lama memang sangat kuat di tingkat domestik. Kekuatan ini mencerminkan kekuasaan yang kuat pada pemerintah, meskipun seringkali otoritas ini terkesan dipaksakan. Sedangkan sisi eksternal dapat dilihat dari sikap barat yang relatif menerima, bahkan mendukung rezim otoriter yang mau bekerja sama dengan mereka.<sup>21</sup>

Presiden Husni Mubarak mulai memerintah Mesir sejak tahun 1981 hingga tahun 2011 setelah presiden sebelumnya, Awar Saddat, mati tertembak pada saat parade oleh pihak yang kontra terhadap kebijakannya. Pada saat memimpin, Presiden Husni Mubarak yang memiliki latar belakang sebagai militer menerapkan sistem yang sangat otoriter. Kelompok-kelompok kontra yang menentang kebijakannya mulai ditangkap. Ia selalu melakukan penangkapan atas

---

<sup>20</sup> Apriadi Tamburaka, *Revolusi Timur Tengah: Kejatuhan Para Penguasa Otoriter di Negara-negara Timur Tengah* (Yogyakarta: Narasi 2011) hlm 69

aktivis yang melakukan pergerakan menentang dirinya, bahkan terhadap gerakan aktivis yang menuntut adanya reformasi politik atas Mesir.<sup>22</sup>

Dalam pemerintahan sendiri, Husni Mubarak bersama perdana menteri, Ahmed Nazif, memang menggalakkan reformasi ekonomi demi memajukan perekonomian Mesir. Namun, tetap saja ia menutup rapat peluang bagi oposisi politik. Dalam bidang politik, pada akhir Februari 2005, Presiden Mubarak mengumumkan perubahan aturan pemilihan presiden menuju ke pemilu multikandidat. Untuk pertama kalinya sejak 1952, rakyat Mesir mendapat kesempatan untuk memilih pemimpin dari daftar berbagai kandidat. Namun peraturan tersebut memunculkan berbagai macam batasan-batasan dan persyaratan sehingga mempersempit peluang bagi tokoh-tokoh lain untuk mencalonkan diri. Hasilnya Mubarak kembali memenangkan pemilu.<sup>23</sup>

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Presiden Husni Mubarak memunculkan pergolakan dari rakyat Mesir sehingga memunculkan gerakan untuk menjatuhkan rezim Husni Mubarak. Gerakan ini pertama kali disosialisasikan melalui media-media sosial seperti media massa dan media internet. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Mesir pada 25 Januari 2012 lalu pertama kali disosialisasikan melalui media sosial dan ternyata sukses untuk merekrut massa kontra terhadap Mubarak. Di Kairo, demo bermula di Maidan At Tahrir (lapangan merdeka) dan di beberapa titik

kota Kairo juga terjadi demonstrasi.<sup>24</sup>Di kantor Mahkamah Agung rakyat juga berdemo menuntut turunnya Husni Mubarak yang sudah berkuasa sekian lama.<sup>25</sup>Kantor partai berkuasa, Al-Hizbul Wathani (Partai Nasional), juga tak luput dari sasaran demonstran, bahkan di Alexandria, empat puluh ribu demonstran mengepung kantor tersebut dan mencopot stiker-stiker bergambar Husni Mubarak.<sup>26</sup>

Demonstrasi ini memunculkan simpati dari dunia internasional. Banyak negara yang kemudian memberikan dukungan dan bersimpati terhadap penderitaan rakyat Mesir. Semakin hari para demonstran terus bertambah jumlahnya sehingga semangat pun terus berkobar. Kementerian Kesehatan Mesir menyatakan, setidaknya ada 365 orang yang tewas selama 18 hari aksi yang dimulai pada 25 Januari 2011.<sup>27</sup>Demonstrasi ini kemudian membawa hasil ketika Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman, mengumumkan mundurnya Mubarak dari jabatannya, dan menyerahkan kekuasaannya kepada Dewan Tertinggi Militer.<sup>28</sup>

## **B. Media dan Revolusi Mesir**

Revolusi Mesir selain digerakkan kaum muda, juga digerakkan oleh media sosial yang berpengaruh besar bagi gelombang demonstrasi 25 Januari 2011.

---

<sup>24</sup>Islamedia, *Mesir 'Panas' oleh Demonstrasi Menuntut Reformasi(online)*, 26 Januari 2011, <<http://www.islamedia.web.id/2011/01/mesir-oleh-demonstrasi-menuntut.html>>, diakses 4 September 2012.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Ibid.*

<sup>27</sup>Elin Yunita Kristanti, *18 Hari Demo Anti Mubarak Tewaskan 365 Orang (online)*, 17 Februari 2011, <<http://dunia.vivanews.com/news/read/205010-18-hari-demo-anti-mubarak-tewaskan-365-orang>>, diakses 6 September 2012.

<sup>28</sup>Era Baru, *Mubarak Mundur, Awal Demokrasi Mesir (online)*, 13 Februari 2011, <<http://erahanet.net/nasional/50-iakarta/23233-mubarak-mundur-awal-demokrasi-di-mesir>>.

Media yang berada dalam genggamannya penguasa Mubarak sebenarnya selalu mengabarkan stabilitas pemerintahan Mubarak, akan tetapi media sosial melalui facebook dan twitter mengabarkan berbagai tragedi dan keganjilan dalam pemerintahan Mubarak. Media sosial ini tak terbatas, melampaui jaringan yang dimiliki pemerintah itu sendiri. Dari sinilah gerakan revolusi di Mesir menjadi kekuatan dahsyat, sampai menggulingkan rezim Mubarak.<sup>29</sup>

Situs-situs internet pemberitaan milik sejumlah gerakan pemuda, partai nasional dan agama, situs pemberitaan oposisi atau independen memiliki peran dalam membentuk opini publik di kalangan para pemuda dan kaum cendekiawan. Situs jejaring sosial Facebook, Twitter dan Youtube memudahkan komunikasi antar pemuda yang tergabung dalam gerakan revolusi. Situs jejaring sosial ini juga mengirimkan banyak informasi dan gambar ketika para wartawan yang sedang meliput dilarang oleh aparat rezim ke tempat kejadian. Namun Terlalu sederhana dalam analisis sosio politik jika kita sebut revolusi itu diciptakan oleh media elektronik.<sup>30</sup>

Media elektronik dan jejaring sosial ini ikut menjadi "batu lompatan" mempercepat mewujudkan hasil revolusi di Mesir, namun mereka bukan "pencipta" revolusi itu. Tanpa media itu, barangkali revolusi tidak akan berhasil secepat itu. Pengaruh media sosial memang sangat berkembang cepat menghasilkan berbagai aksi dari berbagai kalangan baik akademisi, politisi maupun

---

<sup>29</sup> Aminullah Aebat, *Transisi Politik Mesir*, dalam [www.kompasiana.com/noelism/transisi-politik-](http://www.kompasiana.com/noelism/transisi-politik-)

praktisi. Semua mudah mendapatkan informasi yang dapat diakses di internet dalam situs-situs tertentu yang menggambarkan kondisi Mesir pada saat itu.<sup>31</sup>

Pemerintah merasa khawatir dengan protes para demonstran yang bersebaran di media sosial. Pada tanggal 25 Januari 2012 jaringan internet di blokir. Situs Twitter pun diblokir, dan ini membuat warga Mesir marah, selain itu ini juga menambah peningkatan perhatian nasional terhadap perlawanan anti-pemerintah. Pemblokiran akses internet tidak menghalangi rakyat Mesir dalam melakukan protes melalui media. Salah satu reporter CNN Ben Wedeman menulis “tidak ada jaringan internet, SMS Telepon seluler”<sup>32</sup>

Pergolakan di mesir mencatat sejarah baru bagi negara tersebut,yaitu munculnya tokoh-tokoh muda. Tokoh-tokoh baru itu bukanlah mereka yang sudah terkenal seperti ikwanul muslimin, kelompok oposisi populer yang keberadaanya di larang oleh rezim Mubarak dan bukan pula Mohammed El Baradei, peraih nobel perdamaian yang malang melintang di luar negeri semasa aktif memimpin lembaga pengawas nuklir PBB.<sup>33</sup>

Sejumlah inspirator yang dimaksud adalah mereka yang sebelum pergolakan ini di mulai tidak di kenal oleh publik di mesir. Dua tokoh muda yang mendapat sorotan adalah Kholid Said dan Wael Ghoneim. Bagi kaum muda Mesir, Said menjadi pahlawan bagi gerakan pro demokrasi setelah mati

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Sohaib Jassim, *Revolusi Mesir: Peranan Koalisi Pemuda Revolusi*, dalam <http://blog.konspirasi.com/2011/02/revolusi-mesir-peranan-koalisi-pemuda.html>, akses 23

Wael Ghonim salah seorang eksekutif perusahaan jasa informasi internet terbesar di dunia Goggle inc., adalah inspirator yang ikut bergerak menentang rezim Mubarak. Ghonim sejak Februari 2010 tercatat sebagai seorang manager marketing Google untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.<sup>36</sup>

Aksi gigih dan pengorbanan Ghonim yang terinspirasi kematian tragis Said, kebangkitan kesadaran banyak orang di Mesir. Tidak hanya kaum muda tapi juga kaum tua dan warga-warga yang sudah mapan seperti Afan Naged, mantan anggota komisaris bank nasional Mesir, mereka pun turun ke jalan menuntut Mubarak untuk segera turun dari kekuasaan. Kelompok *facebook* mendapatkan dukungan yang sangat luas dan turut memobilisasi masyarakat Mesir untuk turun ke jalan pada 25 Januari 2011. Keterlibatan Ghonim membuatnya dibekuk aparat pada saat unjuk rasa, di sana ia ditahan.<sup>37</sup>

Sebelum di tahan polisi, Ghonim bergerak ke bawah tanah sebagai sebagai aktivis internet, pemuda berusia 30 tahun itu menjadi salah satu penggerak mobilisasi massa melalui internet untuk turun ke jalan dengan mengelola sejumlah grup akun di laman jejaring sosial *facebook*. Pria yang sudah punya 2 anak itu selama 12 hari mendekam di sel berkat lobi dan desakan dari semua pihak, termasuk dari lembaga amnesty internasional, Ghonim akhirnya di bebaskan pada 7 Februari 2011.<sup>38</sup>

Sebelumnya, pada 27 Januari 2011, Ghonim dinyatakan hilang, saat situasi Mesir akibat gelombang demonstrasi panas, akhirnya muncul laporan bahwa Ghonim ditahan polisi Kairo setelah diketahui terlibat dalam gerakan anti Mubarak lewat internet. Di penjara sehari-hari tidak membuat Ghonim kapok, menurut harian LA Times, tak lama setelah bebas, Ghonim bukanya pulang ke Dubai, justru kembali aktif di twitter “kebebasan adalah sebuah berkah dan pantas di perjuangkan di *tweet*-nya.<sup>39</sup>

a. Asma Mahfouz

Nama Asma Mahfouz mungkin tidak sepopuler nama tokoh-tokoh politik yang bersuara dalam revolusi 18 hari menumbangkan rezim Mubarak di Mesir. Tapi dia sosok perempuan muda yang aktif dalam gerakan pembaharuan di Mesir. Orasinya lewat jejaring sosial dan rekaman video telah menginspirasi rakyat Mesir untuk berani melawan pemimpin yang dholim, mesti itu Asma dan keluarganya harus menghadapi tekanan dan tindakan represif.<sup>40</sup>

Asma merupakan salah satu dari sedikit muslimah di Mesir yang berani terjun ke dunia aktivis dan politik. Usianya baru 26 tahun dan dalam usia muda itu, ia sudah menjadi salah satu tokoh gerakan demokrasi di Mesir. Ia lulusan sekolah bisnis dan manajemen di University American Kairo, tahun 2008. Aktivitas Asma di situs jejaring sosial membuatnya terkenal sebagai aktivitas di kalangan anak muda Mesir. Asma adalah salah seorang pendiri gerakan pemuda 6 April sebuah gerakan yang ia gagas lewat akun group di

*facebook*. Akun itu di buat untuk mendukung para buruh di El-Mahalla El-Kubra, pusat industri di utara kota Kairo, yang berencana melakukan aksi mogok kerja tanggal 6 April 2008.<sup>41</sup>

Tapi, Asma harus menerima konsekuensi yang cukup berat karena aktivitasnya itu. Asma juga harus kehilangan pekerjaannya sebagai akuntan di perusahaan ekspor dan impor al-Saimmah, setelah perusahaan itu memecat Asma karena aktivitas politiknya. Konsekuensi pahit itu tak membuat Asma mundur. Ia terus aktif menyuarakan gerakan pro demokrasi di Mesir yang puncaknya terjadi bulan Januari 2011. Dengan menggunakan jejaring sosial *facebook*, *twitter*, dan *youtube*, Asma berhasil menggalang massa untuk berpartisipasi dalam aksi menumbangkan rezim Mubarak. Bahkan setelah Mubarak mundur, pemerintahan baru Mesir pernah meminta untuk bertemu dengan Asma, tapi ia menolak.<sup>42</sup>

Vidio Asma yang diunggah ke *youtube* bahwa 18 Januari 2011 mampu menggerakkan massa untuk turun ke jalan, dalam rekaman vidio itu Asma menceritakan tentang empat warga Mesir yang membakar dirinya sendiri sebagai bentuk protes terhadap kemiskinan, keterpurukan, dan penghinaan yang dilakukan pemerintah. Keempat warga Mesir itu berharap tindakanya dapat memicu revolusi seperti terjadi di Tunisia. "Mungkin kita dapat mendapatkan kebebasan keadilan, kehormatan dan kemuliaan sebagai manusia" Kata Asma dalam rekaman

Setelah menggugah vidionya di *youtube*, Asma datang ke alun-alun Tahrir. Ia berdiri di sana sendirian sambil membawa poster, bahkan menuliskan nomor teleponnya di poster itu. Ia mengajak orang-orang di jalan untuk gabung denganya. Hanya 30 pemuda saja dan mereka semuanya di tangkap oleh polisi Mesir. Setelah insiden itu, Asma bertambah semangat menyerukan aksi protes orang yang mengorbankan dirinya ini (4 orang Mesir yang bakar diri) ini tidak takut mati, tapi takut pada aparat keamanan. Yang dilakukan Asma kemudian mengundang banyak demonstran untuk kembali memperjuangkan revolusi mereka. Saat itu tidak ada kata takut bagi rakyat Mesir yang memimpikan kemerdekaan atas rezim Mubarak.<sup>44</sup>

Kaum muda dan media sosial ini menjadi kekuatan utama dalam revolusi Mesir. Mereka juga yang mengamankan masa transisi dengan penuh damai ketika Mubarak turun. Mereka menjadi generasi baru Mesir yang memberikan oase di tengah ketakutan rezim yang berlaku otoriter. Mereka lahir dengan pemikiran baru dan gagasan yang tepat untuk sebuah reformasi bangsa dalam menatap masa depan.

### **C. Revolusi, Kaum Muda dan Transisi Politik**

“Revolusi 25 Januari di Mesir adalah revolusi kaum muda yang sangat mengharapkan perubahan”. Demikian dikatakan tokoh kaum muda Mesir, Azmi Beshara dalam wawancaranya dengan televisi Aljazeera.<sup>45</sup> Husni Mubarak dalam pidato terakhirnya juga membenarkan perihal peran kaum muda dalam revolusi

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 122

<sup>45</sup>Zuhairi Misraoui, *Revolusi Kaum Muda di Mesir*, Kompas, 10 Maret 2011, hlm. 6.

tersebut. Tidak seperti pidato-pidato sebelumnya, pernyataan politik pada tanggal 10 Februari lalu secara khusus dipersembahkan kepada kaum muda. “Wahai kaum muda Mesir, saatnya melihat ke depan dan melupakan masa lalu”. Mubarak secara tegas mengakui, bahwa revolusi yang bergerak di Mesir merupakan tuntutan dari kaum muda yang sedang kehilangan harapan dan mimpi mereka.<sup>46</sup>

Sayangnya, pernyataan politik mantan orang nomor satu Mesir itu terlambat. Kegagalan Mubarak dalam mempertahankan kekuasaannya hingga akhir September 2010 pada hakikatnya adalah kegagalannya dalam memenuhi tuntutan kaum muda: pemberantasan korupsi, pengangguran, dan melonjaknya harga sembako. Sejak aksi pertama, Mubarak terkesan mengabaikan aksi demonstrasi kaum muda pro demokrasi dan hak asasi manusia, yang jumlahnya pada saat itu masih puluhan ribu orang.<sup>47</sup>

Fenomena kebangkitan kaum muda di Mesir dapat digambarkan dalam tiga hal. *Pertama*, kebangkitan kaum muda kelas menengah yang terjun dalam dunia bisnis. Mesir adalah negara yang pertumbuhan ekonominya tidak terlalu baik, sebagaimana Turki, Malaysia dan Brazil. Tetapi juga tidak seburuk negara-negara miskin yang berdekatan dengan Mesir, seperti Sudan dan Somalia. Peluang usaha terbuka bagi kalangan muda dengan pasar yang kompetitif dan investasi yang mulai berdatangan dalam sepuluh tahun terakhir. Kalangan muda yang relatif mandiri dari segi ekonomi telah menjadikan mereka tidak mudah untuk di

kooptasi oleh rezim yang berkuasa. Mereka mempunyai kemandirian ekonomi dan kebebasan untuk menentukan masa depannya tanpa intervensi penguasa.<sup>48</sup>

Kedua, kebangkitan kaum muda terpelajar. Sudah sejak lama, Mesir memberlakukan pendidikan gratis dari sejak dini hingga perguruan tinggi. Setiap warga Mesir dengan mudah mendapatkan pendidikan hingga tingkat doktor dengan subsidi penuh dari negara. Bahkan, Mesir membuka kesempatan kepada negara-negara lain, termasuk WNI untuk belajar di Al-Azhar tanpa pungutan biaya. Bahkan, ribuan WNI mendapatkan beasiswa dari pemerintah Mesir.<sup>49</sup>

Kaum muda yang menempuh pendidikan kejuruan mencapai 36 %. Sedangkan, mereka yang melanjutkan perguruan tinggi mencapai 28 %. Yang perlu mendapatkan catatan khusus, kaum muda yang mempunyai minat untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin besar, sehingga lahirlah kalangan muda terpelajar yang mempunyai pikiran-pikiran cerdas dan matang untuk kemajuan bangsa.

Sayangnya potensi mereka tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintahan Mubarak, karena sistem politik yang menekan dan tertutup. Konsentrasi pemerintahan Mubarak pada modernisasi peralatan militer dan tidak mampu memberikan lapangan pekerjaan yang secukupnya bagi kaum muda terpelajar. Tidak hanya itu saja, gaji yang disediakan bagi lulusan perguruan tinggi tidak sepadan dengan kapasitas keilmuan dan kebutuhan pokok mereka

Konsekuensinya, banyak kaum muda terpelajar yang menganggur dan jika ingin mendapatkan pekerjaan, mereka memilih untuk bekerja di luar negeri, baik di negara-negara teluk yang sangat makmur atau Eropa , bahkan Amerika Serikat. Sejumlah perguruan tinggi di negara-negara Teluk umumnya mengimpor para guru besar dari Mesir. Mereka juga menyediakan gaji yang cukup besar.

Ketiga, kaum muda yang aktif menggunakan media sosial, khususnya facebook dan twitter. Mereka adalah kaum muda yang mampu membangun jaringan sosial yang luas, tanpa batas. Mudahnya akses internet bagi kaum muda telah menyebabkan mereka dapat berkomunikasi dengan masyarakat luas untuk membicarakan tentang apa saja, baik yang terjadi di dunia maupun di Mesir.<sup>51</sup>

Menurut laporan yang dikeluarkan pemerintah tentang teknologi informasi di Mesir, bahwa kaum muda Mesir adalah pengguna facebook terbesar di dunia Arab. Sedangkan sebagai pengguna Youtube, Mesir menduduki urutan kedua. Pengguna internet di Mesir mencapai kurang lebih 22 juta orang.

Fenomena meluasnya pengguna internet dan keterlibatan kaum muda secara aktif dalam menggunakan facebook dan twitter dalam membicarakan masalah-masalah sosial-politik, menyebabkan konsolidasi kaum muda dapat dilakukan secara cepat dan intensif. Selama ini, mereka tidak diperkenankan membentuk perhimpunan dan perkumpulan, karena dianggap mengganggu stabilitas politik rezim politik yang berkuasa.

Hadirnya facebook dan twitter telah memungkinkan mereka membicarakan masalah-masalah sosial-politik. sehingga perlu dilakukan upaya

perubahan. Ketiga hal tersebut merupakan gagasan yang telah berhasil melahirkan revolusi 25 Januari. Kaum muda Mesir memandang, mereka mempunyai potensi yang besar untuk membangun dan menjadikan negaranya sebagai salah satu kemenangan peradaban terbesar di dunia Arab, bahkan di dunia internasional. Sejarah masa lalu yang cemerlang merupakan cermin mereka untuk bangkit dari keterpurukan sosial, ekonomi dan politik. Jika di masa lalu, nenek moyang mereka mampu membangun peradaban terbesar di dunia, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk mengulangi kembali kesuksesan orang-orang terdahulu.<sup>52</sup>

Gerakan kaum muda Mesir ini menamakan dirinya sebagai “Koalisi Pemuda Revolusi”, karena semua kekuatan politik ini berusaha untuk mensukseskan revolusi ini sebagai “image revolusi kerakyatan,” karena apabila dibuat di bawah kepemimpinan politik yang terpisah-pisah, sudah belum tentu hal ini akan dimatikan oleh pemerintah sejak pertama kali muncul.

Koalisi Pemuda Revolusi ini terdiri dari : Pemuda Gerakan 6 April, Pemuda untuk Keadilan dan Kebebasan, Pemuda Ikhwanul Muslimin yang ditangkapi rezim yang lalu (Rezim Hosni Mubarak) sekitar 30 ribu orang selama sepuluh tahun yang lalu, Pemuda Kampanye Kerakyatan untuk Mendukung El-Baradei, Partai Front dan para independen lainnya yang muncul di jejaring sosial di internet.<sup>53</sup>

Ada pernyataan penting yang disuarakan Koalisi Pemuda Revolusi di tenda pimpinan Koalisi Pemuda Revolusi di alun-alun At-Tahrir saat itu.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*

<sup>53</sup>Sohaib Jassim, *Revolusi Mesir: Peranan Koalisi Pemuda Revolusi*, edisi Februari 2011, <http://blog.konspirasi.com/2011/02/revolusi-mesir-peranan-koalisi-pemuda.html>, akses 1

Pernyataan penting itu berupa teks yang dihasilkan perwakilan kaum muda untuk menatap Mesir masa depan. Teks yang dibacakan di Al-Jazeera oleh Wakil Ketua Dewan Presiden, Muhammad Fuad, itu berbunyi:

“Kami adalah rakyat Mesir, pemilik kedaulatan atas wilayah, nasib serta kekayaan kami yang telah diambil alih kembali dengan revolusi 25 Januari, revolusi rakyat, sipil dan demokrasi, dan pengorbanan para pahlawannya.....”<sup>54</sup>

Setelah pengantar itu disampaikan, Koalisi Pemuda Revolusi menyampaikan revolusi damai untuk menatap masa depan Mesir. Peristiwa yang terjadi setelah tergulingnya Mubarak ini menuntut sepuluh point perubahan.

*Pertama*, pencabutan keadaan darurat segera. *Kedua*, pembebasan segera semua tahanan politik. *Ketiga*, pencabutan konstitusi yang ada dan perubahannya. *Keempat*, pembubaran Majelis Rakyat, Majelis Syura dan Dewan Legislatif lokal, (Dewan Tertinggi Angkatan Bersenjata Mesir benar-benar telah membubarkan Majelis Rakyat dan Dewan Syura).

*Kelima*, pembentukan majelis pemerintahan presidensial transisi yang terdiri dari lima anggota, termasuk tokoh militer, dan empat tokoh dari sipil yang diakui untuk patriotisme mereka dan disetujui oleh semua, dengan catatan untuk setiap anggota tidak berhak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden pertamayang akan datang.

*Keenam*, membentuk pemerintahan transisi yang terdiri dari kompetensi dan independen nasional, tidak termasuk aliran politik atau partisan yang

mengurus urusan negara dan penyedia bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang bebas dan pemilihan yang adil pada akhir masa transisi untuk jangka waktu tidak lebih dari sembilan bulan, dengan catatan tidak boleh anggota dari pemerintahan transisi ini mecalonkan diri sebagai presiden atau anggota dewan di pemilu legislatif dan presiden pertama nanti.

*Ketujuh*, membentuk susunan dewan kepengurusan inti "Jam'iyah Ta'sisiyyah" untuk pengembangan konstitusi demokratis yang baru sesuai dengan konstitusi demokratis tertua dan perjanjian internasional hak asasi manusia, dan direferendumkan ke rakyat dalam waktu tiga bulan dari deklarasi pembentukan susunan dewan kepengurusan.

*Kedelapan*, kebebasan untuk membentuk partai politik berdasarkan dasar-dasar sipil, demokratis dan damai, tanpa syarat atau kualifikasi. *Kesembilan*, peluncuran kebebasan pers dan pertukaran informasi. *Kesepuluh*, peluncuran kebebasan untuk mengorganisir semua jenis serikat dan organisasi masyarakat sipil.

*Kesebelas*, pembatalan semua pengadilan militer dan luar biasa dan semua putusan-putusan yang dikeluarkan oleh mahkamah terhadap rakyat sipil. *Keduabelas*, rakyat Mesir memohon dari Tentara Nasional Mesir yang berbakti sebagai generasi dari rakyat yang besar ini, yang menjaga darah rakyat dan menjaga keamanan dalam negeri dalam revolusi besar untuk mengumumkan edensi penuh dari semua keputusan dan tuntutan revolusi dan bergabung secara

Selain 15 tuntutan tersebut yang ditegaskan juga oleh Ikhwanul Muslimin dan akan segera akan menyusul pengumuman tentang partai politik, ternyata ada yang menuntut agar kasus-kasus korupsi dan kasus-kasus administrasi di semua sektor segera diusut dan diungkap dan semua kasus tersebut dibawa ke meja hijau. Juga ada tuntutan agar segera dilakukan investigasi atas para penyerang/penembak yang menewaskan sebagian demonstran dan ratusan demonstran lainnya hilang selama satu bulan terakhir ini.

#### **D. Militer dalam Transisi Politik Mesir**

Berakhirnya kekuasaan Husni Mubarak membawa Mesir pada fase transisi dalam politik pemerintahannya. Dalam fase transisi, Mesir berusaha membentuk sistem pemerintahan baru yang lebih demokratis dengan meninggalkan sistem otoriter Mubarak. Fase transisi ini ditandai dengan terjadinya kekosongan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam kekosongan kekuasaan tersebut, muncullah militer sebagai pemegang tampuk kekuasaan sementara. Dalam kasus Mesir, militer mendapat kepercayaan dari rakyat untuk memegang posisi kepemimpinan sementara. Ini dilatarbelakangi oleh sikap netral yang ditunjukkan oleh militer selama terjadi gerakan *people power* yang menumbangkan rezim Mubarak.

Seperti dikutip dari tulisan Alfred Stepan, *Egypt's military won the trust of many Tahrir Square activists in late January 2011 by acknowledging "the legitimacy of the people's demands" and promising "not resort to the use of force*

*against this great people.*<sup>56</sup> Militer kemudian dipandang memiliki keberpihakan pada kepentingan negara, bukan kepentingan rezim berkuasa. Dalam tulisan tersebut, sehari setelah kepergian Mubarak dari kantornya, para petinggi militer Mesir bertemu dan mengeluarkan *Communiqué #1* yang berisi, *...they, as the "Supreme Council of the Armed Forces [SCAF]... based on the responsibility of the Armed Forces and commitment to the protection of the people and the people's interests and safety... has decided to continue meeting regularly to study the options, procedures and measures to keep the safety of the nation and the ambitions of the great Egyptian people."* Tahrir Square was flooded with shouts that *'the people and the Army are one hand.*<sup>57</sup>

*Communiqué #1* kemudian diikuti dengan 150 *Communiqué* lain yang berisi kebijakan-kebijakan dan membentuk sistem politik untuk mengatur negara.

Militer, dalam hal ini adalah SCAF, menempati posisi penting dalam masa transisi. SCAF menggantikan pemerintahan konstitusi dan membentuk pemerintahan sementara. Pemerintahan sementara ini berada di bawah komando Field Marshal Muhammad Hussein Tantawi. Pemerintahan sementara oleh militer ini bertanggung jawab mengawal proses transisi Mesir dan segera mungkin dapat mengadakan penyelenggaraan pemilu. Pada perkembangannya pemindahan

---

<sup>56</sup>Alfred Stepan, *'Two Perspectives on Egypt's Transition'*(online), Freedom House 13 Januari 2012, <<http://www.freedomhouse.org/blog/two-perspectives-egypt's-transition>>, diakses 3 Agustus 2012. Alfred Stepan merupakan Wallace Sayre Professor of Government di Columbia University dan author atau co-author (bersama Juan J. Linz) beberapa buku dan artikel tentang *military authoritarianism, democratic transition and consolidation, dan religion and democracy*.

kekuasaan kepada pemerintahan sipil akan dilaksanakan pada 1 Juli 2012 setelah presiden baru telah terpilih.<sup>58</sup>

Militer sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan sementara bertanggungjawab membuat kebijakan yang diperlukan untuk proses transisi. Militer berusaha melibatkan dan selalu berkonsultasi dengan kelompok ahli dan kelompok intelektual. Namun pada faktanya, para jenderal yang berwenang membuat kebijakan seringkali mengambil keputusan secara sepihak. Kebijakan yang diambil terkadang cenderung untuk mengamankan kepentingan militer. Militer seakan-akan terjebak dalam kekuasaan *status quo*. Ini salah satunya terlihat dari tidak disusunnya *consensual road map* secara jelas dan sistematis untuk menuju transisi demokrasi. Militer pun dianggap kurang transparan karena tidak diungkapkan secara jelas siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan konsitusi baru.<sup>59</sup>

Salah satu kebijakan yang dibuat yang sangat kental dengan kepentingan militer adalah *Draft Declaration of Basic Principles for the Constitution of the Egyptian State* yang salah satu pasalnya berisi “*Supreme Command of the Armed Forces has the exclusive right to investigate and monitor issues in relation to the military forces. The Council has the exclusive right to discuss the military budget, which should be placed on the top of general state budget, and approve laws concerning the military forces before their promulgation*”.<sup>60</sup>

---

<sup>58</sup>Edmund Blair, 'Egypt Military Fends off Islamist Critics' (online), Reuters 25 Maret 2012, <<http://www.reuters.com/article/2012/03/25/us-egypt-military-idUSBRE8200CE20120325>>, diakses 4 Agustus 2012.

<sup>59</sup>*Ibid.*

<sup>60</sup>Steven L. Taylor, *The Military in Egyptian Politics* (online), 11 Februari 2011, <<http://www.outsidethebeltway.com/the-military-in-egyptian-politics/>> diakses 12 Agustus 2012.

Sikap militer yang cenderung menyimpang dari tujuan revolusi tersebut mengakibatkan munculnya gelombang pertentangan dari rakyat. Rakyat menentang SCAF yang kebijakannya tidak sejalan dengan cita-cita revolusi dan cenderung melanggengkan kekuasaan militer. Rakyat menuntut pembubaran SCAF dan pengunduran diri Field Marshal Muhammad Hussein Tantawi. Namun, tuntutan rakyat tersebut mendapat perlawanan dari militer. Hal ini semakin mempertegas adanya kepentingan militer dalam wilayah politik Mesir.<sup>61</sup>

Militer Mesir yang memegang kekuasaan *de facto* sejak protes mulai membesar kemudian menjadi pihak yang menerima kekuasaan dari rezim Mubarak. Militer kemudian menjalankan sebuah pemerintahan darurat. Jelas di sini militer menjadi pengawal penting bagi proses reformasi politik Mesir. Peran militer di politik Mesir tampak sejak masa demonstrasi besar hingga terbentuknya tata politik Mesir yang stabil di masa yang akan datang.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat Mesir merupakan perwujudan dari konsep *anomic interest group*, dimana mereka cenderung tidak terstruktur serta aksi yang dilakukan pada umumnya merupakan tindakan yang semena-mena namun memiliki tujuan yang sama. Munculnya *anomic interest group* ini juga pada dasarnya dipicu oleh kondisi *limited pluralism* yang terjadi di Mesir dibawah rezim Mubarak.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa Mubarak menerapkan sistem yang sangat ketat pada pemerintahannya, peluang-peluang bagi oposisi politiknya ditutup rapat, dan gerakan-gerakan para aktivis sangat

---

<sup>61</sup>Iran Indonesian Radio – IRIB World Service, *Kegagalan Barat Membajak Revolusi Mesir (online)*, 30 November 2011, <[http://indonesian.irib.ir/telistik/-/asset\\_publisher/k0Z8/content/id/4948561](http://indonesian.irib.ir/telistik/-/asset_publisher/k0Z8/content/id/4948561)>, diakses 2 Agustus 2012.

dihalangi. Sehingga kebebasan masyarakat Mesir dapat dikatakan sangat dibatasi.<sup>62</sup>

Militer Mesir, terlepas dari motif yang melatarbelakangi, kemudian menjalankan fungsinya sebagai pemegang kekuasaan, dengan cara mengambil alih pemerintahan. Militer lebih dipercaya rakyat waktu itu dibandingkan dengan Wakil Presiden Omar Suleiman, untuk kemudian membentuk pemerintahan transisi.

Omar Suleiman dipandang sebagai “orang Mubarak” dan dikhawatirkan akan membentuk pemerintahan dari loyalis NDP (*National Democratic Party*) untuk mempertahankan *status quo*. Sedangkan jika motif ekonomi dimasukkan, militer memandang runtuhnya Mubarak merupakan akhir dari sebuah era kenyamanan dan awal dari era yang tidak menentu. Sehingga, elit militer merasa perlu untuk memastikan “masa depan yang lebih baik” dengan cara memegang kekuasaan dan menjalankannya untuk kepentingan sendiri. Opsi ini yang dipilih militer Mesir dibandingkan menyerahkan pemerintahan langsung kepada sipil.<sup>63</sup>

Namun, tekanan yang begitu besar pasca reformasi membuktikan bahwa militer memang tidak memiliki cukup keterampilan dalam berpolitik. Hal ini terbukti dari adanya kasus-kasus yang menyebutkan bahwa begitu kentalnya kepentingan militer ketika memimpin. Kenyataan ini di satu sisi malah membuktikan bahwa militer selama ini memang tidak mempersiapkan diri untuk

---

<sup>62</sup>Boni Andika, Analisis Peran Militer Mesir Pasca Jatuhnya Husni Mubarak(online), 8 Juni 2012. <http://andikaboni.blogspot.com/2012/06/analisis-peran-militer-mesir-pasca.html>, akses 28

berpolitik secara benar. Artinya, militer pada masa Mubarak berada di posisi nyaman mereka tidak perlu melibatkan diri cukup jauh dalam urusan politik.<sup>64</sup>

Selain itu, jatuhnya Husni Mubarak merupakan gambaran suatu kekuatan rakyat yang besar. Dimana dalam kasus ini rakyat mampu menumbangkan rezim otoriter Husni Mubarak. Yang kemudian militer menjalankan peran sebagai *new military professionalism*, dimana militer tidak hanya berperan di dalam dunia pertahanan namun juga di dunia perpolitikan. Hal ini secara nyata dilaksanakan oleh para militer. Militer merupakan pilihan rakyat yang dianggap tepat didalam menjalankan tugas kenegaraan atau untuk menuju pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut dilakukan atau disetujui oleh masyarakat karena militer merupakan organ yang dianggap netral oleh masyarakat Mesir pasca jatuhnya Husni Mubarak.<sup>65</sup>

Namun, di dalam perjalanannya pemerintahan transisi yang dijalankan oleh militer mendapatkan kontra dari masyarakat. Maka muncul banyak demonstrasi yang sudah tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat Mesir. Demonstrasi itu menuntut ketua Dewan Militer, Hussein Tantawi, segera mundur dan digantikan presiden terpilih. Masyarakat Mesir menginginkan adanya revolusi namun revolusi yang diinginkan oleh masyarakat pun tak kunjung datang. Maka muncullah sejumlah protes yang terjadi mengkritisi keberadaan Dewan Militer Mesir yang dinilai gagal melakukan reformasi.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup>*Ibid.*

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>BBC Indonesia, *Keamanan Mesir Tahan 300 Pengunjukrasa(online)*, 6 Mei 2012, <[http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120506\\_mesirdemo.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2012/05/120506_mesirdemo.shtml)>, diakses 7 Juli 2012.

### **E. Transisi, Liberalisasi Politik dan Lahirnya Partai Baru**

Transisi politik yang terjadi di Mesir pasca Husni Mubarak menghadirkan fenomena yang bernama reformasi politik. Reformasi politik yang dilakukan di Mesir membuka kesempatan lebar bagi masyarakat untuk aktif dan terlibat langsung dalam politik.

Reformasi politik ini kemudian melahirkan yang namanya liberalisasi politik. Menurut O'Donnell dan Schmitter, liberalisasi politik merupakan fase transisi dari otoritarianisme entah menuju kemana. Apa yang disebut liberalisasi adalah proses pendefinisian ulang dan perluasan hak-hak. Liberalisasi merupakan proses mengefektifkan hak-hak yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh negara. Liberalisasi politik awal pasca Mubarak di Mesir ditandai antara lain terjadinya redefinisi hak-hak politik rakyat.<sup>67</sup>

Ketika Mubarak tumbang, setiap kalangan menuntut kembali hak-hak politiknya yang selama bertahun-tahun dikerangkeng oleh negara. Konsekuensi dari liberalisasi politik ditandai dengan terjadinya ledakan partisipasi politik. Ledakan ini terjadi dalam bentuk yang beragam. Pada tataran akar rumput (*grass root*), ledakan partisipasi politik banyak mengambil bentuk huru-hara, kekerasan massa, amuk massa, atau praktek penjarahan kolektif. Sementara ledakan partisipasi politik di kalangan elit politik ditandai dengan maraknya pendirian partai politik.<sup>68</sup>

Sebagai perwujudan dari ledakan partisipasi politik itu, para elit politik berlomba-lomba mendirikan kembali partai politik, sehingga jumlah partai politik banyak. Ini ditandai setelah Mubarak turun. Semua kalangan berlomba-lomba mendirikan partai politik untuk menyuarkan aspirasinya. Ketika Mubarak masih ada, hanya Partai Nasional Demokratik (*National Democratic Party*) yang mempunyai hak politik begitu besar, selainnya hanya menjadi figuran saja dalam berpolitik.<sup>69</sup>

terbukanya demokrasi yang tertutup rapat selama 30 tahun selama era Mubarak, berimbas pada meledaknya partisipasi politik. Ini bukanlah hal yang mengejutkan, karena banyak kalangan yang telah memperhitungkan sebelumnya. Sebuah sistem politik yang sangat akut ini sedang mencari format terbaik, guna terciptanya sebuah sistem yang sehat seperti yang digambarkan oleh David Easton. Sebuah sistem merupakan sebuah keseluruhan yang saling berinteraksi di dalamnya, di mana terdiri atas sub-sub sistem.

Jadi sebagai sebuah keseluruhan, sistem politik Indonesia perlu adanya sebuah evaluasi ulang atas fungsi-fungsi lembaga berdasarkan aturan yang telah ada. Proses input sebuah kebijakan haruslah kebutuhan mendasar sebuah masyarakat yang ditafsirkan sebagai doa-doa makhluk terhadap Tuhannya, ibarat sebuah harapan.<sup>70</sup>

Sistem politik digambarkan secara sederhana oleh David Easton sebagai sebuah proses pembuatan kebijakan (konversi). Proses ini tidak lahir begitu saja. Ada sebuah proses yang mendahuluinya, yakni proses input atau masukan. Proses

---

<sup>69</sup>*Ibid.*, hlm. 106

<sup>70</sup>Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, hlm 123

input ini terdiri dari setidaknya dua variabel, yakni dukungan dan tuntutan (*supply and demand*).

Adapun setelah terjadinya proses konversi dari kedua variabel input tersebut, maka proses itu lantas disebut keluaran atau output. Keluaran dari sebuah sistem politik dengan demikian disebut sebagai hasil kebijakan atau kebijaksanaan. Kebijakan atau kebijaksanaan yang dilahirkan dari sebuah proses konversi dari sebuah sistem politik tidak dengan sendirinya berakhir, melainkan terus berproses dalam bentuk umpan balik (*feed-back*). Demikian seterusnya, bahwa proses politik dari sebuah sistem politik tidak akan pernah berakhir karena adanya proses *feed-back* tersebut.<sup>71</sup>

Pasca turunnya Mubarak, setiap kelompok dan golongan di Mesir mendefinisikan hak politik masing-masing dengan berbagai strategi politik. Yang paling jelas tentunya adalah mendefinisikan hak politiknya dengan membuat partai politik. Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi yang sebelumnya dilarang hak politiknya oleh Mubarak menjadi kelompok yang paling berkepentingan untuk mendirikan partai politik, karena selama berpuluh tahun, Ikhwanul Muslimin selalu berada dalam posisi yang tertekan, bahkan diburu-buru oleh negara.<sup>72</sup>

Terbukanya demokrasi pasca jatuhnya Mubarak menjadi energi besar bagi Ikhwanul Muslimin untuk bersatu dalam mendirikan partai politik. Akhirnya, pada 22 Februari 2011, Ikhwanul Muslimin mendirikan partai bernama *Hizbul Hurriyah wal 'Adalah*, atau dikenal dengan FJP (*Freedom and Justice*

---

<sup>71</sup>*Ibid.*, hlm. 124

<sup>72</sup>Abu Ghazzah, *Musim Semi*, hlm. 132

*Party*).Partai yang disahkan oleh pemerintah pada 24 Juni 2011 ini menjadi jalan politik yang paling utama bagi Ikhwanul Muslimin. Secara formal, FJP inilah partai yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin, tetapi banyak partai Islam lain yang sebenarnya didirikan oleh tokoh dan kader Ikhwanul Muslimin.<sup>73</sup>

Di samping Ikhwanul Muslimin, kaum salafi juga mendirikan partai bernama An-Nur.Kaum salafi termasuk golongan Islam yang mempunyai pengaruh besar di Mesir, walaupun masih dibawah Ikhwanul Muslimin.Kaum salafi ini juga mempunyai jaringan yang luas, bukan saja di Mesir, tetapi juga di Timur Tengah dan dunia Islam.Partai An-Nur ini juga menjadi partai yang mempunyai pendukung besar, sehingga hadirnya menjadikan partai Islam mendominasi politik Mesir pasca jatuhnya Mubarak.<sup>74</sup>

Kedua partai di atas kemudian menjadi partai yang meraih suara besar dalam Pemilu Legislatif di Mesir, bahkan kedua partai tersebut kalau disatukan, hampir menguasai parlemen Mesir.Sementara itu Jamaah Islamiyah juga mendirikan partai bernama Hizbul Bina' wat Tanmiyah, walaupun massanya tidak banyak, tetapi Jamaah Islamiyah mempunyai jaringan internasional yang kuat. Kelompok Islam yang lain juga mendirikan beragam partai politik, di antaranya adalah *Hizbul Ashalah, Hizbul Amal, Hizbul Fadhilah, Hizbut Tauhid Al-Arabi, Hizbus Salamah wat Tanmiyah, Hizbul Ishlah, Hizb Mishrul Bina', Hizbul Ishlah wan Nahdhah*.Selain juga *Jabhah Salafiyah -Front Salafi-* dan *Tiyar Islami Am, Gerakan Umum Islam*.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup>*Ibid.*,hlm. 134

<sup>74</sup>*Ibid.*,hlm. 135

<sup>75</sup>Aminullah Arbat. *Transisi Politik Mesir*, dalam [www.kompasiana.com/noelism/transisi-nolitik-](http://www.kompasiana.com/noelism/transisi-nolitik-)

Di samping itu, kelompok nasionalis-liberal juga tak mau kalah dalam mendirikan partai politik. Mereka mendirikan partai bernama Partai Al-Wafd. Kaum nasionalis-liberal ini adalah kelompok masyarakat menengah ke atas yang mempunyai jejaring sosial dengan berbagai kalangan. Mereka yang selama ini selalu mengusung tema tentang demokrasi, pluralisme dan multikulturalisme. Mereka adalah aktivis NGO (*non government organization*), aktivis kampus dan sebagian para pengusaha.<sup>76</sup>

Bukan itu saja, warga Kristen juga mendirikan partai politik. Partai Kristen Mesir (*Egypt Cristian Party*), itulah namanya. Walaupun tidak banyak warga Kristen, tetapi definisi hak politik memberikan akses yang luas bagi setiap warga negara, termasuk Kristen, untuk ikut serta dalam mendirikan partai politik. Setiap kelompok dan golongan yang mempunyai hak yang sama dalam mendefinisikan hak politiknya, sehingga suaranya didengar oleh wakil rakyat di parlemen. Walaupun tidak banyak yang menaruh simpati, tetapi Partai Kristen Mesir ini membuktikan bahwa liberalisasi politik benar-benar dirasakan rakyat sebagai bentuk dari perkembangan demokrasi yang dirasakan rakyat pasca tumbanganya Mubarak.<sup>77</sup>

Lahirnya berbagai partai politik ini menjadi indikasi bahwa demokrasi berkembang pesat di Mesir pasca Mubarak turun. Lahirnya partai politik ini menjadikan suara rakyat bisa tersalurkan, sehingga tidak lagi di halangi, atau hanya didominasi oleh satu partai politik saja. Rakyat Mesir mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyuarakan pendapat dan pikirannya, karena

rakyat mendapatkan kebebasan ruang dan tempat untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya.<sup>78</sup>

Liberalisasi politik menjadikan partai politik bermakna sangat penting, karena suara setiap individu diakui dan diperhitungkan oleh partai politik. Setiap partai politik akan memperhitungkan setiap suara individu, karena suara individu itulah yang kalau menjadi akumulasi, menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Ini sangat berbeda dengan sebelumnya, karena hanya partai penguasa yang mempunyai kesempatan besar, itupun harus sesuai dengan kehendak sang pemimpin. Kehendak rakyat menjadi terabaikan, hanya menjadi aspirasi yang tidak tersalurkan.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup>Muhammadun, *Liberalisasi Politik Pasca Muharok*, Buletin Damar, edisi Juni 2011.